

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis informasi mengenai suatu objek atau kegiatan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui nilai atau kualitas objek yang dievaluasi serta menjadi dasar dalam menentukan keputusan atau tindakan perbaikan. Menurut Yunus (2021) evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai suatu objek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan pengertian tersebut, evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk mengetahui dan menilai suatu objek secara sistematis dengan membandingkan kondisi yang ditemukan dengan kriteria, tujuan, atau kondisi yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui bagian yang telah berjalan dengan baik, bagian yang masih mengalami permasalahan, serta hal-hal yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan kegiatan penilaian terhadap penerapan dan pelaksanaan SIPD dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi SIPD tidak hanya melihat apakah aplikasi dapat digunakan, tetapi juga melihat bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam pekerjaan pengguna, bagaimana

proses pengelolaan data dilakukan, apakah informasi yang dihasilkan dapat digunakan sesuai kebutuhan, serta kendala yang muncul selama sistem digunakan.

Dengan demikian, mengevaluasi SIPD berarti melakukan penilaian secara sistematis terhadap penerapan SIPD dengan melihat kondisi sistem dan pelaksanaannya dibandingkan dengan tujuan, kebutuhan, dan kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi yang terjadi selama penerapan SIPD, seperti kemudahan atau kesulitan pengguna dalam menjalankan sistem, kesesuaian proses kerja dengan sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, kendala teknis maupun nonteknis, serta kemampuan sistem dalam mendukung kebutuhan pekerjaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengetahui kondisi penerapan SIPD dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.

2.2 Tinjauan atas Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah penyajian sistematis mengenai kondisi keuangan suatu daerah yang mencerminkan posisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam satu periode tertentu (Purnama et al., 2025). laporan yang disusun secara sistematis oleh pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan dana seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terkait dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan kredit;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi pelaporan entitas, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk mencapai semua tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi terkait sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi, berbagai komponen anggaran (termasuk transfer dan pembiayaan), sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas dari entitas pelaporan. Tujuan ini selaras dengan teori pelaporan sektor publik yang menekankan peran laporan keuangan dalam menciptakan akuntabilitas, transparansi, serta membantu pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan publik.

2.2.3 Peranan Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah peranan Pelaporan Keuangan Laporan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, penerapan dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu mengawasi kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap pelaporan kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk melaksanakan pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah yang akan datang akan ikut mengeluarkan beban tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah tidak hanya menampilkan riwayat kinerja keuangan masa lalu, tetapi juga menjadi alat utama bagi para pengambil kebijakan dan anggota legislatif dalam merancang cara pengelolaan anggaran di masa depan yang lebih baik.

2.2.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri atas komponen-komponen berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ringkasan sumber, alokasi, serta penggunaan dana keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan ini menampilkan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan terkait aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional memberikan gambaran sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan data kas terkait aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitori, mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menampilkan peningkatan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan ini berisi penjelasan naratif atau rincian angka dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi wajib/disarankan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan penting untuk penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasinya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya. Dengan demikian, relevansi informasi laporan keuangan berkaitan dengan tujuan penggunaannya..

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan

4. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dalam bentuk dan istilah yang mudah dipahami sesuai dengan kemampuan pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut.

2.3 Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dengan efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam organisasi (Arsyana et al., 2024). Menurut Yohana (2021) Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan Informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi dapat disimpulkan sebagai alat penting dalam organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan. Sistem ini menghasilkan laporan yang terorganisir dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial serta mempermudah pengelolaan perusahaan bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

2.3.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola informasi keuangan untuk berbagai kepentingan organisasi. Tujuan utama SIA adalah untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan melaporkan

transaksi keuangan agar menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan (Amalia, 2023). SIA juga menyediakan informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, SIA memastikan transaksi dicatat dengan benar, sesuai prosedur, dan dapat ditelusuri untuk meminimalkan kesalahan serta kecurangan.

2.3.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Perkembangan teknologi informasi berkontribusi dalam penerapan sistem informasi akuntansi melalui otomatisasi pencatatan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan. Sistem ini juga mendukung integrasi data, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, sistem informasi akuntansi menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan untuk menyesuaikan strategi, mengidentifikasi peluang, dan menghadapi perubahan pasar. Beberapa manfaat sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan informasi keuangan.
2. Mendukung percepatan pelaksanaan proses pengambilan keputusan.
3. Membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pengelolaan dan pengolahan informasi.

4. Menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, serta memiliki tingkat keandalan yang tinggi.
5. Mempermudah perusahaan dalam melakukan penelusuran terhadap transaksi keuangan secara cepat dan efektif.

2.3.4 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Untuk memastikan bahwa data dan informasi lainnya yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi benar, akurat, dan dikirim dengan tepat, karakteristik sistem informasi akuntansi harus dikontrol. Berikut Karakteristik dari Sistem Informasi Akuntansi yaitu:

1. Komponen (*Components*)

Suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan.

2. Batas Sistem (*Boundary*)

Ruang lingkup sistem adalah area yang membatasi sistem dengan sistem lain atau lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan sistem dianggap sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan.

3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Lingkungan luar sistem adalah segala sesuatu yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang memengaruhi operasi sistem tersebut.

4. Penghubung (*Interface*)

Penghubung sistem berfungsi sebagai penghubung antara subsistem. Penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain, dan keluaran dari suatu subsistem dapat menjadi masukan ke subsistem yang lain.

5. Masukan (*Input*)

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*), yang mencakup bahan yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi, atau masukan sinyal (*signal input*), yang mencakup masukan yang diproses untuk menghasilkan keluaran.

6. Keluaran (*Output*)

Keluaran adalah hasil dari proses. Keluaran dapat berupa masukan data ke sistem lain atau hanya sisa pembuangan.

7. Pengolah (*Process*)

Process yaitu mengubah *input* ke *output* yang diinginkan dikenal sebagai pengolahan.

2.3.5 Komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Hidayatussa'adah & Firdaus (2025) Sistem informasi memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, seperti akuntan dan analis keuangan, berperan penting dalam pengoperasian dan pengelolaan SIA. Sumber Daya Manusia bertanggung jawab memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan sesuai standar.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak akuntansi seperti MYOB, SAP, atau *QuickBooks* digunakan untuk mencatat transaksi, menghasilkan laporan keuangan, dan mendukung analisis data. *Software* ini membantu otomatisasi proses akuntansi.

3. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan data, mendukung operasional SIA dengan menyediakan sarana untuk pemrosesan dan penyimpanan data.

4. Data Akuntansi

Data keuangan yang dimasukkan dalam sistem mencakup catatan transaksi, faktur, laporan bank, dan data lain yang relevan. Data ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bisnis.

5. Prosedur dan Instruksi

Prosedur mencakup langkah-langkah dalam mengelola dan memproses data akuntansi, seperti pencatatan jurnal, posting ke

buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Prosedur ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

6. Jaringan dan Teknologi

SIA modern sering terhubung dengan jaringan, baik lokal maupun berbasis *cloud*, untuk memungkinkan akses data secara *real-time* dan terintegrasi antara berbagai divisi dalam perusahaan.

2.4 Tinjauan atas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

2.4.1 Pengertian SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mempunyai tugas untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat serta sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintah daerah (Hardiansyah & Jaffisa, 2024)

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 aturan pemerintah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

2.4.2 Tujuan Penerapan SIPD

Menurut Tulkhoriyah (dalam Bajo & Muhammad, 2025) peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif biasa, tetapi telah berkembang menjadi *platform* strategis yang membantu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, SIPD mampu menghasilkan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan situasi terkini. SIPD menghubungkan berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam satu jaringan yang terintegrasi. Jaringan ini memudahkan pengumpulan data secara online dan secara *real-time* berkat penggunaan teknologi informasi.

2.4.3 Ruang Lingkup SIPD

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, didalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdapat ruang lingkup yang meliputi:

1. Informasi Pembangunan Daerah

SIPD dirancang untuk mengelola data dan informasi terkait perencanaan Pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sistem ini mendukung proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja

Perangkat Daerah, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis serta penyusunan profil pelaksanaan Pembangunan daerah. Selain itu, SIPD juga berfungsi sebagai sarana pembaruan data dan informasi perencanaan secara berkelanjutan. Informasi yang tersedia dalam sistem ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan daerah, Tingkat kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik serta daya saing daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

SIPD memungkinkan pengelolaan data keuangan daerah dilakukan secara lebih terstruktur dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dicakup meliputi:

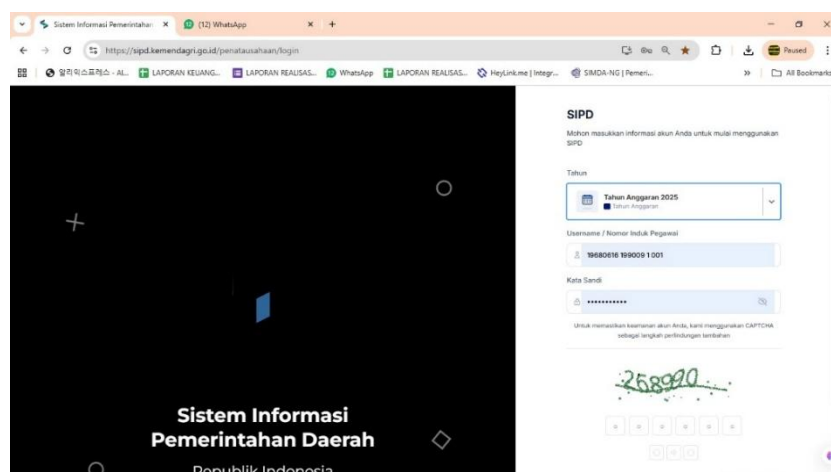
- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Pengkodean dan struktur

anggaran disusun secara sistematis sejak tahap perencanaan, kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan cepat. Selain itu, pengkodean kegiatan secara nasional juga mendukung integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintahan pusat, khususnya dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan.

3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

SIPD juga menyediakan berbagai informasi umum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi tersebut meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan, Peraturan Daerah (Perda), serta data umum lainnya yang dihimpun dan dikelola oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SIPD

Sumber: BPKAD Kab. Brebes

2.5 Analisis *PIECES*

Menurut James Wetherbe dalam Kurniawan (2025) metode *PIECES* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi berdasarkan enam dimensi utama yang dapat memengaruhi kinerja sistem. Akronim *PIECES* berasal dari enam aspek yaitu *Performance* (Kinerja), *Information* (Informasi), *Economy* (Ekonomi), *Control* (Pengendalian), *Efficiency* (Efisiensi), dan *Service* (Pelayanan). Masing-masing aspek ini membantu dalam mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang perbaikan dari sistem informasi yang sedang berjalan.

Metode *PIECES* dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi secara komprehensif dan terstruktur. Evaluasi melalui pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan telah memberikan kinerja yang optimal, informasi yang akurat dan tepat waktu, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta kemampuan sistem dalam mengendalikan dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sistem informasi karena bersifat fleksibel dan aplikatif di berbagai jenis organisasi. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Adi & Maria (2023) berjudul "Evaluasi Sistem Informasi Akademik Satya Wacana Menggunakan *Pieces Framework*", ditemukan bahwa penggunaan metode *PIECES* membantu dalam mengidentifikasi kelemahan sistem akademik dari sisi

efisiensi dan pelayanan, sehingga rekomendasi perbaikan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing aspek *PIECES* menurut James Wetherbe dalam Kurniawan (2025):

1. *Performance* (Kinerja Sistem)

Aspek ini mengukur seberapa baik sistem mampu menyelesaikan tugasnya secara cepat, tepat, dan sesuai target. Masalah kinerja muncul apabila sistem sering mengalami keterlambatan dalam memproses data, gagal memenuhi permintaan pengguna, atau tidak mampu menangani beban kerja yang tinggi. Evaluasi kinerja penting untuk memastikan sistem tidak menghambat jalannya proses bisnis utama. Permasalahan yang sering terjadi pada aspek ini meliputi:

- a) Waktu respon sistem yang lambat saat input data.
- b) Kegagalan sistem dalam memproses transaksi secara *real-time*.
- c) Terjadinya *downtime* atau *crash* yang menghambat operasional.

Dalam konteks sistem informasi akuntansi, kinerja sistem yang tidak optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan, kesalahan pencatatan transaksi, dan gangguan dalam proses pengambilan keputusan manajerial.

2. *Information* (Kualitas Informasi)

Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus relevan, akurat, lengkap, dan tersedia tepat waktu. Apabila informasi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem perlu diperbaiki. Penilaian pada aspek ini fokus pada kualitas dan

kegunaan informasi yang disajikan oleh sistem. Beberapa permasalahan pada aspek informasi antara lain:

- a) Data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- b) Informasi yang tidak lengkap atau terpotong.
- c) Informasi yang disajikan terlalu kompleks atau membingungkan pengguna.

3. *Economy* (Biaya Operasional)

Aspek ini mengevaluasi efisiensi biaya dalam pengembangan dan operasional sistem informasi. Sistem dikatakan bermasalah jika biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, atau terdapat pemborosan anggaran. Selain itu, manfaat ekonomi seperti peningkatan produktivitas, penghematan biaya, atau peningkatan penjualan juga menjadi indikator penting dalam penilaian. Tanda-tanda adanya masalah ekonomi pada sistem antara lain:

- a) Biaya implementasi yang terlalu tinggi tanpa hasil yang signifikan.
- b) Tidak adanya efisiensi biaya operasional pasca penerapan sistem.
- c) Ketergantungan tinggi pada pihak ketiga (vendor) yang memerlukan biaya tambahan.

Idealnya, sistem informasi yang baik akan menurunkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perusahaan.

4. *Control* (Pengendalian dan Keamanan Sistem)

Sistem informasi harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk menjaga keamanan data dan integritas proses. Pengendalian ini mencakup otorisasi akses, audit trail, dan validasi input. Sistem dengan kontrol yang terlalu longgar dapat memicu penyalahgunaan data, sedangkan kontrol yang terlalu ketat bisa menghambat operasional. Evaluasi kontrol bertujuan menemukan keseimbangan antara keamanan dan efisiensi. Pengendalian yang perlu dievaluasi mencakup:

- a) Hak akses pengguna yang tidak sesuai (misalnya, semua karyawan bisa mengubah data tanpa batasan).
- b) Tidak adanya pencatatan histori perubahan data (audit trail).
- c) Validasi data input yang lemah, sehingga data ganda atau salah bisa masuk ke sistem.

Kelemahan pada aspek pengendalian dapat membuka celah terjadinya kecurangan (*fraud*), manipulasi data, atau kerusakan sistem akibat *human error*.

5. *Efficiency* (Efisiensi Proses)

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan sistem dalam memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Sistem yang tidak efisien ditandai dengan proses input data yang berulang, proses yang terlalu panjang, penggunaan waktu yang tidak efektif, informasi yang berlebihan atau tidak dibutuhkan, serta pemakaian tenaga dan bahan yang tidak proporsional. Evaluasi efisiensi membantu menemukan potensi

perbaikan dalam proses kerja yang lebih hemat biaya dan waktu. Input data yang berulang. Tanda-tanda sistem yang tidak efisien antara lain:

- a) Adanya proses kerja yang berulang atau tidak perlu.
- b) Penggunaan waktu yang berlebihan untuk tugas-tugas sederhana.
- c) Ketergantungan tinggi pada input manual, padahal bisa diotomatisasi.

Evaluasi efisiensi bertujuan untuk mencari cara menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas kerja.

6. *Service* (Kualitas Layanan Sistem kepada Pengguna)

Aspek pelayanan mencakup sejauh mana sistem mampu memberikan kepuasan kepada pengguna. Hal ini meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan respon terhadap permintaan, kejelasan antar muka, serta dukungan teknis ketika terjadi kendala. Sistem dengan pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna, sedangkan sistem yang buruk dapat menurunkan produktivitas dan kepuasan kerja. Permasalahan yang bisa terjadi pada aspek ini seperti:

- a) Sistem sulit digunakan oleh pengguna karena tampilan yang tidak intuitif.
- b) Minimnya pelatihan atau panduan penggunaan sistem.
- c) Respons lambat dari tim IT saat terjadi masalah teknis.

Sistem informasi yang memberikan pelayanan baik dapat meningkatkan kenyamanan, kepuasan, dan loyalitas pengguna, sehingga mendukung keberhasilan implementasi sistem secara keseluruhan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Penelitian				
1	Zahrul Setiawan, Lanto Ningrayati Amali, & Muchlis Polin (2023)	Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo	Deskriptif kuantitatif.	Kualitas SIPD berdasarkan ISO/IEC 25010 pada kategori “baik” dengan nilai rata-rata 76,0%. Karakteristik dengan kualitas paling tinggi yaitu <i>Portability</i> (portabilitas) (77,5%) sedangkan yang paling rendah yaitu <i>Performance Efficiency</i> (73,8%). Hasil ini juga dapat dijadikan pertimbangan atau rekomendasi untuk meningkatkan kualitas SIPD, dengan melihat karaktersistik yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna atau sebaliknya.
2	Ziyan Faza (2025)	Evaluasi Sistem E-Puskesmas Menggunakan Metode <i>Pieces</i> di	Deskriptif kuantitatif.	Evaluasi Sistem e-Puskesmas di Puskesmas Kesambi Tahun 2025 dari aspek <i>performance</i> (85%), <i>information</i> (88%), <i>economy</i> (86%),

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Puskesmas Kesambi Pada Tahun 2025		<i>control</i> (86%), <i>efficiency</i> (86%), <i>service</i> (86%). Kesimpulan dari 6 aspek semuanya termasuk kategori sangat baik.
3	Eko Saputra, Muhammad Jibril & Dwi Yuli Prasetyo (2026)	Evaluasi Sistem Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Kependudukan di DISDUKCAPIL Inhil	Deskriptif kuantitatif.	Hasil evaluasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan metode <i>PIECES Framework</i> , dapat disimpulkan bahwa aplikasi IKD telah membantu proses pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi lebih mudah dan praktis bagi masyarakat.
4	Lystia Risqi Kurniawan (2025)	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dengan Menggunakan Metode Analisis	Deskriptif kualitatif.	Sistem informasi akuntansi pada siklus persediaan <i>sparepart</i> telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam hal kecepatan input transaksi (<i>Performance</i>) dan penyajian

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>PIECES</i> : Studi Kasus pada PT. Nagamas Mitra Sejati		informasi yang akurat dan tepat waktu (<i>Information</i>).
5	Edi & Sabran (2020)	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ToliToli	Deskriptif kualitatif.	Penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan para operator administrasi dan komputerisasi berkaitan dengan pengoperasian Aplikasi SIMDA Keuangan dan juga dapat memberikan kemudahan serta penghematan dari sisi pembiayaan ekonomi (<i>cost</i>) sehingga tidak lagi menjadi beban pengeluaran yang besar bagi instansi.

Sumber : Berbagai jurnal penelitian, 2026.